

BAB VI

DETERMINAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

**Valentina Febria Eka Amanda¹⁾, Henny Murtini²⁾,
Ardhana Reswari Hasna Pratista³⁾**

Accounting study program, Faculty of Economics and
Business, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

febriamanda89@gmail.com¹⁾,

hennymurtini@mail.unnes.ac.id²⁾,

ardhanareswari@mail.unnes.ac.id³⁾



Abstrak Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan cita-cita pemerintah dan tujuan dari otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua kegiatan operasionalnya tanpa bergantung dana dari pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan empat variable independent, yakni investasi, ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk dan kemakmuran. Populasi dalam penelitian ini yakni pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi dengan indeks kemandirian fiskal terendah. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 155 unit analisis. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan *software* StataMP Versi 17. Variable ukuran pemerintah dan kemakmuran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Variable investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dan variable jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan kearah negative terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Investasi, Ukuran Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Kemakmuran

Pendahuluan

Kemandirian keuangan daerah adalah terkait cara pemerintah daerah mengelola pendapatan asli daerahnya sendiri serta mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat ataupun pinjaman yang beredar (Purnama, 2016). Kemandirian keuangan suatu daerah merupakan cita-cita pemerintah serta tujuan dari otonomi daerah, yakni adanya hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah diterapkan karena adanya kesempatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola serta membiayai semua kegiatan operasional dalam pemerintahan (Sari, 2023). Adanya kemandirian keuangan daerah diharapkan pemerintah daerah dapat

mengetahui lebih dalam mengenai hal-hal ataupun kondisi daerah setempatnya dibandingkan dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya diharapkan memegang prinsip akuntabilitas serta transparan. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penggunaan dana pendapatan asli daerah yang baik serta bertanggungjawab. Dengan tersebut, pemerintah daerah akan mendapatkan pengakuan yang baik dari masyarakatnya. Adanya kesempatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya menjadi kesempatan pemerintah daerah dalam pengoptimalan penentuan aturan penarikan pajak dengan memegang prinsip tidak ada pihak yang dirugikan, melainkan hanya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Factor-faktor yang memengaruhi keberhasilan otonomi daerah yakni kemampuan sumber daya manusia yang meliputi aparatur pemerintah maupun masyarakat, sumber daya alam, keuangan, kemampuan manajemen serta keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, berikut beberapa contoh kasus dari kemandirian keuangan daerah. Tahun 2019, mayoritas kabupaten atau kota di Indonesia bagian timur berada pada kondisi belum mandiri secara finansialnya, selain itu di Indonesia bagian barat juga masih banyak kabupaten atau kota yang baru menuju mandiri keuangan daerahnya. Tahun 2019 hanya beberapa kabupaten atau kota dalam lingkup pulau jawa yang dapat dikatakan cukup mandiri dalam membiayai semua kegiatan operasional pemerintah. Pada tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengatakan bahwa dari 503 pemerintah daerah yang ada di Indonesia, diketahui sebanyak 443 dari 503 pemerintah daerah masuk ke dalam kategori kemandirian keuangan daerah yang rendah, serta hanya 2% yang telah mandiri secara finansialnya. Tahun 2019 masih adanya provinsi yang mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebesar 13,9 Triliun untuk membiayai semua kegiatan operasional dalam pemerintahan. Kemudian selain itu, masih banyaknya daerah kabupaten atau kota yang mengalami tingkat pendapatan asli daerah yang rendah sehingga masih bergantung dengan suntikan dana dari pemerintah pusat. Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan bahwa



masih banyak kabupaten atau kota di Indonesia yang masih rendah pendapatan asli daerahnya, sehingga hal tersebut meningkatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat.

Penelitian mengenai kemandirian keuangan daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya telah dilakukan secara ekstensif, namun menunjukkan hasil inkonsisten sehingga sulit untuk ditarik kesimpulan secara umum. Dalam penelitian ini peneliti menambah satu variabel yaitu investasi dengan harapan dapat menambah keanekaragaman penelitian ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk dan kemakmuran dalam hubungannya menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh investasi, ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, dan kemakmuran terhadap kemandirian keuangan daerah. Eliza & Murtini (2014) mengatakan bahwa investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Akan tetapi berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hamzami Ulfi (2022) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh secara positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Investasi pada daerah yang besar dapat disimpulkan bahwa pemerintah berhasil mengelola keuangan untuk pembangunan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan investasi serta kepemilikan modal saham yang besar.

Penelitian lebih lanjut mengenai kemandirian keuangan daerah mengungkapkan bahwa ukuran pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Ukuran pemerintah daerah dapat dilihat berdasarkan jumlah asset yang dimiliki daerah. Pemerintah dengan asset besar dinilai mampu membiayai semua kegiatan operasional pemerintahannya menggunakan asset yang dimiliki, dan mengurangi ketergantungan adanya dana dari pemerintah pusat ataupun mengurangi Tindakan pengambilan pinjaman. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riswanda & Wahyudin (2014), Lubis & Ningsi (2022) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rofiq & Arza (2021) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah

daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Riset lain mengatakan bahwa jumlah penduduk merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Pemerintah harus dapat melakukan strategi untuk mengelola sumber daya manusia dengan baik untuk menghindari adanya demografi penduduk pada tahun kedepannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rofiq & Arza (2021) yang menyatakan bahwa penduduk berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfi & Sari (2023) yang menyatakan bahwa penduduk berpengaruh secara signifikan kearah negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian penelitian menurut Natoen *et al.*(2019) mengatakan bahwa penduduk tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian selanjutnya menyatakan bahwa kemakmuran dapat mempengaruhi kemandirian keuangan suatu daerah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eliza & Murtini (2014) dan Riswanda & Wahyudin (2014) mengatakan bahwa kemakmuran berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Semakin tingginya kemakmuran, maka semakin besar pula pendapatan daerah yang diterima sehingga menyebabkan peningkatan finansial daerah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masdiantini & Erawati (2016) yang menyatakan bahwa kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Melihat masih terdapat permasalahan mengenai kemandirian keuangan daerah serta masih terdapatnya inkonsistensi pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian terdahulu, menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan maksud menguji kembali hubungan variabel investasi, ukuran pemerintah daerah, penduduk, dan kemakmuran terhadap kemandirian keuangan daerah.



Teori dan Pengembangan Hipotesis

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *stewardship*. Teori *stewardship* adalah suatu teori yang menggambarkan hubungan dua individu antara *steward* (pengelola) dan *principals* (masyarakat) untuk mencapai tujuan organisasi yang tercipta karena adanya kepercayaan sama lain (Nurhayati et al., 2021). Donaldson & Davis (1991) mengatakan bahwa teori *stewardship* sangat sesuai diterapkan didunia pemerintahan karena kekuasaan tertinggi berada di masyarakat. Maka dengan adanya teori *stewardship* ini dapat membantu terwujudnya cita-cita atau tujuan organisasi, yakni tujuan antara masyarakat dan pemerintahan untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang baik. Teori *stewardship* mengasumsikan adanya komitmen terhadap kesejahteraan dan kebutuhan orang lain (Secchi, 2017). Anton (2010) menekankan bahwa pemerintah sebagai *steward*, pemerintah harus mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan organisasi dengan memberikan manfaat maksimal pada organisasi.

Pemerintah sebagai pengelola harus dapat mengelola semua sumber pendapatan asli daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah yakni melakukan pemerataan mulai dari pendidikan, fasilitas kesehatan, lapangan pekerjaan yang memadai dan tersedianya sarana dan prasarana dalam pemerintahan. Lapangan pekerjaan yang memadai dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam daerah. Kemudian besarnya kepemilikan modal pemerintah pada badan usaha lainnya dapat mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang baik. Tersedianya fasilitas pada masyarakat dapat memicu peningkatan pendapatan dari masyarakatnya. Masyarakat sebagai pemilik yakni dapat berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan melakukan pembayaran pajak, retribusi dan pungutan lainnya dengan tepat waktu. Kemudian memberikan inovasinya untuk meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan daerah (Sundaramurthy & Lewis, 2003).

Keterkaitan teori *stewardship* dengan investasi adalah pemerintah sebagai *steward* atau pengelola berhak melakukan pengelolaan serta upaya dalam meningkatkan investasi pada daerahnya. Kepemilikan modal yang besar dalam pemerintahan terhadap badan usaha lainnya dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah yang dihasilkan. Besarnya investasi disuatu daerah akan mempermudah pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi serta pemerataan pembangunan disetiap daerah. Pernyataan tersebut semakin diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ulfi (2022) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

H_1 : Investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Ukuran pemerintah daerah merupakan besarnya asset yang dimiliki oleh pemerintahan. Asset merupakan kekayaan daerah dalam bentuk infrastruktur serta sarana dan prasarana (Riswanda & Wahyudin, 2014). Ukuran pemerintah yang baik yakni yang dapat dikelola pemerintah dengan baik sehingga menghasilkan jumlah yang besar. Pemerintah memiliki tuntutan untuk mengelola serta menjaga dengan baik asset yang dimilikinya serta melakukan pengelolaan dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat bagi Masyarakat dan pemerintah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riswanda & Wahyudin (2014) dan Lubis & Ningsi (2022) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

H_2 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih yang bertujuan untuk menetap. Penduduk merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Semakin besar penduduk disuatu wilayah, maka akan meningkatkan permintaan serta penawaran ekonomi yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian semakin besar penduduk disuatu daerah juga akan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada Masyarakat agar pemerintah



mendapatkan pengakuan dari Masyarakat mengenai kinerja pemerintah yang baik. Hal ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rofiq & Arza (2021) yang menyatakan bahwa penduduk berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Jumlah penduduk yang besar diimbangi dengan kebijakan ataupun aturan dari pemerintah dengan tujuan tercapainya cita-cita masyarakat dengan pemerintah.

H₃ : Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kemakmuran merupakan kemampuan daerah dalam mencukupi kebutuhan guna menuju kesejahteraan. Kemakmuran erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi penduduk setempat. Semakin besar pendapatan masyarakatnya, maka daerah tersebut semakin mandiri serta sejahtera. Kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan perkapita daerah tersebut. Diberlakukannya otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memberdayakan seluruh potensi daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riswanda & Wahyudin (2014) yang menyatakan bahwa kemakmuran berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

H₄ : Kemakmuran berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Objek penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi dengan indeks kemandirian fiskal terendah tahun 2020-2022. Metode purposive sampling digunakan untuk penentuan sampel penelitian. Jumlah populasi sebanyak 183 unit analisis dan hanya 155 yang memenuhi kriteria sampel. Data yang dikumpulkan bersumber dari

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK RI dan data pada Badan Pusat Statistik. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah, investasi, ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, dan kemakmuran.

Tabel 6. 5 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Singkatan	Metode pengukuran	Referensi
Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah dalam membiayai semua kegiatannya tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat.	KKD = PAD/Subsidi Pemerintah Pusat + Pinjaman x 100%	(Ermawati & Aswar, 2020)
Investasi	Investasi merupakan Tindakan atau proses mengalokasikan sejumlah sumber daya dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.	Investasi = Σ Investasi Jangka Panjang	(Ulfi, 2022)
Ukuran Pemerintah Daerah	Ukuran pemerintah merupakan seberapa banyak sumber daya ekonomi atau aset yang dimiliki suatu daerah.	Ukuran Pemerintah Daerah = Total Aset Periode Tertentu	(Riswanda & Wahyudin, 2014)
Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk merupakan berapa banyak jumlah orang yang bertempat tinggal lebih dari satu tahun atau kurang dari satu tahun dengan tujuan untuk menetap di daerah tersebut.	Jumlah Penduduk = Data Sensus Penduduk	(Rofiq & Arza, 2021)
Kemakmuran	Kemakmuran atau wealth merupakan kemampuan daerah dalam mencukupi kebutuhan guna menuju kesejahteraan.	Wealth = PDRB Per kapita	(Riswanda & Wahyudin, 2014)

Hasil

Hasil analisis deskriptif mengenai kemandirian keuangan daerah, investasi, ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk dan kemakmuran dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 6. 6 Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Min	Max	Std
KKD	155	75,8	1,00	151,00	43,39
Investasi	155	178.310,8	17731,00	2.555.86,90	371.694,08
Size Jumlah Penduduk	155	4.459,9	1232,00	47.024,10	5.671.497,09
Kemakmran	155	748,7	28,00	2.880,00	668,51
	155	27.754,4	0,00	4.077,26	50.410,81

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Uji asumsi klasik atau uji prasyarat terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil regresi data panel sebelumnya dinyatakan bahwa model penelitian ini adalah Random Effect Model (REM) dimana pada model ini pengujian yang diwajibkan adalah uji normalitas dan uji multikolinearitas. Hasil uji normalitas diperoleh nilai probability sebesar 0.46 yang artinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yakni 0.05. oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dan nilai korelasi antar variable independent dibawah 10.00 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian besaran koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0.43, hal ini disimpulkan bahwa secara keseluruhan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variable independent yang berpengaruh terhadap variable dependen sebesar 43% dan 57% dijelaskan oleh variable lain yang tidak diteliti.

Tabel 6. 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	t-hitung	Sig
Investasi	-0.73	-0.92	0.359
Ukuran Pemerintah Daerah	0.23	2.03	0.043
Penduduk	-0.00	-3.65	0.000
Kemakmuran	0.47	5.94	0.000
Konstanta	51.79	4.00	0.000
F-hitung	4.789		
Sig.F	0.000		

Tabel 6. 8 Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Hasil	Keputusan
H ₁ : Investasi berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Koefisien: 0,359. P>t : -0,73	H ₁ ditolak
H ₂ : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Koefisien: 0,043. P>t : 0,23	H ₂ diterima
H ₃ : Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Koefisien: 0,000. P>t : -0.00	H ₃ ditolak
H ₄ : Kemakmuran berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Koefisien: 0,000. P>t : 0,47	H ₄ diterima

Tabel 5 menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat investasi di setiap pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia. Selain itu kepemilikan modal saham pada pemerintah daerah pada badan usaha lainnya mempengaruhi besaran keuntungan yang dihasilkan berdasarkan nominal investasi yang disetorkan. Selain itu nilai investasi yang tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun menyebabkan daerah mengalami ketertinggalan dalam pemerataan pemabngunan daerah. Hal ini berdasarkan data yakni investasi di Kota Sorong pada tahun 2020 terhadap PT Bank Papua hanya memiliki modal saham kurang dari 20 persen, hal ini menyebabkan Kota Sorong tidak dapat melakukan penambahan investasi selama tiga tahun berturut-turut, dan mengalami ketertinggalan dalam pembangunan. Berbeda dengan Kabupaten Bojonegoro yang memiliki kepemilikan modal saham terhadap badan usaha diatas 50 persen memudahkan Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi. Hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris dari penelitian terdahulu yang dilakukan Eliza & Murtini (2014) yang menyatakan bahwa investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfi (2022) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian statistik mengenai hipotesis tersebut menunjukkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Ukuran pemerintah daerah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.043 lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan telah terbukti diterima. Hal ini berarti semakin besar total asset di daerah, maka pemerintahan mampu membiayai semua kegiatan menggunakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari asset yang dimiliki. Kemudian besarnya asset yang dimiliki pemerintah dapat meningkatkan pelayanan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah harus melakukan transparansi serta akuntabilitas terhadap pengelolaan asset pemerintahan. Azzahra & Wibowo (2019) menyatakan bahwa semakin besar total asset dalam pemerintahan, maka semakin banyak modal yang ditanam serta banyaknya perputaran uang dalam pemerintahan yang dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pernyataan ini diperkuat berdasarkan data di lapangan, bahwa Kota Surabaya memiliki total asset yang besar pada tiga tahun. Akibatnya Kota Surabaya maju dalam hal Pembangunan, pemenuhan sarana dan prasarana serta kota yang telah mempermudah memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riswanda & Wahyudin (2014) dan Lubis & Ningsi (2022) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan dan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil pengujian statistik mengenai hipotesis tersebut, menunjukkan bahwa penduduk berpengaruh secara signifikan kearah negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni penduduk berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga, secara empiris hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini terbukti ditolak. Lebih lanjut, nilai signifikansi dalam variabel ini sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 dengan kearah negatif. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin banyaknya penduduk disuatu daerah, maka akan menurunkan pendapatan asli daerah tersebut. Selain itu, banyaknya penduduk disuatu daerah juga menimbulkan permasalahan yang harus dihadapi oleh

pemerintah, serta belum terlaksanakannya pembayaran pajak atau retribusi tepat waktu oleh wajib pajak. Persebaran penduduk terbanyak dalam penelitian ini berada di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan beberapa factor yang memengaruhinya, seperti letaknya yang strategis, kebutuhan pangan yang tercukup, serta iklim yang sesuai dan lain sebagainya. Jumlah penduduk yang banyak harus dapat dikendalikan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan untuk pemerintahan kedepannya. Hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Natoen *et al* (2019) yang menyatakan bahwa penduduk berpengaruh secara signifikan kearah negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil pengujian statistik mengenai hipotesis tersebut menunjukkan kemakmuran berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga, secara empiris hipotesis keempat (H4) diterima. Lebih lanjut, nilai signifikansi variabel kemakmuran sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.047 kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti besarnya tingkat kemakmuran daerah yang dilihat dari pendapatan domestik regional bruto perkapita dapat mempengaruhi kemandirian keuangan suatu daerah. Kemakmuran bersumber dari pertumbuhan ekonomi yang ada pada daerah tersebut, sehingga pemerintah serta Masyarakat harus dapat mengelola serta menggunakan dana dengan sebaik mungkin untuk mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Penelitian ini menyatakan bahwa kabupaten atau kota dengan kemakmuran tinggi yakni di Kota Surabaya. Meskipun adanya pandemi Covid-19, pendapatan perkapita Kota Surabaya tidak mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan sektor industri di Surabaya berada dalam keadaan unggul semua, meliputi sektor konstruksi, reparasi, industri pengolahan dan lainnya. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riswanda & Wahyudin (2014) dan Harumiati *et al* (2014) yang menyatakan bahwa kemakmuran berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah.



Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini yakni investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, kemudian variable ukuran pemerintah daerah dan kemakmuran berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah dan jumlah pendudukan berpengaruh secara signifikan kearah negative terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia diharapkan dengan diterapkan otonomi daerah dapat menggali lebih dalam mengenai potensi daerahnya yang unggul serta melakukan peningkatan pengelolaan asset pemerintahan secara efektif dan efisien dan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan pendapatan perkapita pada daerah.

Keterbatasan dalam penelitian ini yakni hanya berfokus pada empat variable independent yakni investasi, ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, dan kemakmuran. Kemudian objek penelitian yang hanya berfokus pada pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi dengan indeks kemandirian fiscal terendah pada tahun 2020-2022. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variable lain yang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah serta dapat mengganti variable ataupun pengukuran pada variable yang tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah serta penambahan objek pada penelitian.

Daftar Pustaka

- Alfi, M. R., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Leverage, Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020. 5(3), 1098–1114.
- Anton, F. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATiKA*, 1(2), 61–80.
- Azzahra, A. S., & Wibowo, N. (2019). Pengaruh Firm Size dan Leverage Ratio terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 9(1), 13–20. <https://doi.org/10.55601/jwem.v9i1.588>

- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Eliza, & Murtini, H. (2014). Karakteristik Pemerintah Daerah Pendorong Kemandirian Keuangan Daerah Di Jawa Tengah. 3(4), 457-465.
- Ermawati, E., & Aswar, K. (2020). Assessing Regional Finance Independence in Indonesian Local Governments. *European Journal of Business and Management Research*, 5(1), 1-5. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.1.178>
- Harumiati, Y., Karakteristik, P., Daerah, P., & Temuan, D. (2014). Yayuk Harumiati dan Payamta : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan ... 3(2), 75-87.
- Lubis, I. T., & Ningsi, E. H. (2022). Enrichment: Journal of Management is Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) Enrichment: Journal of Management Determinants Of Financial Performance In Local Governments In District/City In Indo. *Enrichment: Journal of Management*, 12(2), 2385-2390.
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1150-1182.
- Natoen, A., Febriyanti, A., Sarikadarwati, & Ardiani, S. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 106-117.
- Nurhayati, N., Fitriana, R., Isrowiyah, A., Zahroh, F., & Widyani, I. P. (2021). Does Wealth Levels, Reliance and Leverage Influence Financial Performance? *Quality - Access to Success*, 22(185), 177-183. <https://doi.org/10.47750/QAS/22.185.24>
- Purnama, Y. D. (2016). *Kemandirian Keuangan Daerah*. 01, 1-23.
- Riswanda, & Wahyudin, A. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. 3(4), 457-465.
- Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 705-719. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.414>
- Sari, A. M. (2023). Otonomi Daerah. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-otonomi-daerah/>



- Secchi, D. (2017). Stewardship Theory is board accountability necessary? *The Electronic Library*, 34(1), 1-5.
- Sundaramurthy, C., & Lewis, M. (2003). Control and collaboration: Paradoxes of governance. *Academy of Management Review*, 28(3), 397-415. <https://doi.org/10.5465/AMR.2003.10196737>
- Ulfi. (2022). Investasi Daerah Dan E-Government Serta Implikasinya terhadap Kemandirian Daerah. *Bina Ekonomi*, 25(2), 115-134. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5259.21-40>